

PERAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI PERBANKAN DALAM MENDORONG AKSES PEMBIAYAAN UMKM

**I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi¹, I Made Hary Kusmawan², I Wayan Suarbawa³,
Rochmad Bayu Utomo⁴**

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tabanan
Kediri, Tabanan, Indonesia

³Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Tabanan
Kediri, Tabanan, Indonesia

⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

e-mail: gungmasp@gmail.com¹

Received : September, 2025

Accepted : September, 2025

Published : September, 2025

Abstract

Access to financing remains a significant barrier for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in developing their businesses in Indonesia. Two crucial factors in overcoming this barrier are financial literacy and banking inclusion. This study examines the relationship between bank financing, financial literacy, and banking inclusion through a literature review approach. The findings indicate that high financial literacy enables MSME actors to understand and manage financial information more effectively, thereby increasing their confidence in applying for loans. Banking inclusion, on the other hand, provides broader access for MSME actors to utilize various formal financial services, supporting the growth and sustainability of their businesses. The synergy between financial literacy and banking inclusion creates a more inclusive ecosystem, although challenges such as stringent collateral requirements and complex loan application processes still need to be addressed. Effective collaboration among financial institutions, government, and community organizations is essential to strengthen financial literacy and banking inclusion. Financial education programs tailored to the needs of MSMEs are expected to enhance their financial knowledge and skills, making them better prepared to seize financing opportunities. Sustainable collaborative efforts among various stakeholders are key to improving access to financing for MSMEs, thereby supporting inclusive and sustainable national economic growth.

Keywords: Financial Literacy; Banking Inclusion; Access to Financing; MSMEs

Abstrak

Akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha di Indonesia. Dua faktor yang dianggap krusial dalam mengatasi hambatan ini adalah literasi keuangan dan inklusi perbankan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pembiayaan perbankan, literasi keuangan, dan inklusi perbankan melalui pendekatan literatur review. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang tinggi memungkinkan pelaku UMKM memahami dan mengelola informasi keuangan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengajukan pinjaman. Inklusi perbankan, di sisi lain, memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal, yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Sinergi antara literasi keuangan dan inklusi perbankan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, meskipun tantangan seperti persyaratan agunan yang ketat

dan proses pengajuan pinjaman yang rumit masih perlu diatasi. Kolaborasi yang efektif antara lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat literasi keuangan dan inklusi perbankan. Program edukasi keuangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan finansial mereka, sehingga pelaku UMKM lebih siap dalam memanfaatkan peluang pembiayaan. Upaya kolaborasi berkelanjutan antar berbagai pihak menjadi kunci untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; Inklusi Perbankan; Akses Pembiayaan; UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam struktur perekonomian Indonesia. Data terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor formal (Kemenkop UKM, 2023). Kontribusi ini menegaskan bahwa UMKM bukan hanya sekadar unit usaha, melainkan fondasi yang menopang sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut, UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja utama, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam.

Pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia juga tercermin dalam kemampuannya dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat terjadi gejolak atau krisis. Pengalaman menunjukkan bahwa UMKM lebih resilien dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan usaha skala besar (Tambunan, 2019). Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor ekonomi (OECD, 2020).

UMKM juga memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga tersebar di daerah-daerah pedesaan dan terpencil (World Bank, 2022). Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya lokal dan mengembangkan produk-produk khas daerah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi (UNCTAD, 2021).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap pembiayaan. Banyak UMKM kesulitan untuk mendapatkan modal usaha karena berbagai faktor, seperti persyaratan agunan yang ketat, proses pengajuan pinjaman yang rumit, dan kurangnya informasi mengenai produk keuangan (Beck & Cull, 2014). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan inklusi perbankan menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat erat kaitannya dengan akses terhadap pembiayaan perbankan. Pembiayaan perbankan menjadi sumber modal penting bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). Tanpa akses yang memadai terhadap pembiayaan perbankan, UMKM seringkali kesulitan untuk bersaing dengan usaha yang lebih besar dan inovatif, sehingga mengancam keberlangsungan usaha mereka (Ayyagari et al., 2011). Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, pertumbuhan yang lebih cepat, dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi (Berger & Udell, 2006).

Literasi keuangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu memahami persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman, serta mengelola keuangan usaha secara efektif

(Lusardi & Mitchell, 2014). Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, pelaku UMKM dapat menyusun proposal pinjaman yang lebih meyakinkan, mengelola arus kas dengan lebih baik, dan mengurangi risiko gagal bayar (Klapper & Lusardi, 2020). Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pihak bank terhadap UMKM dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan persetujuan pinjaman (Atkinson & Messy, 2013).

Inklusi perbankan juga memiliki dampak signifikan terhadap akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan. Semakin tinggi tingkat inklusi perbankan di suatu wilayah, semakin banyak UMKM yang memiliki akses terhadap layanan perbankan formal, termasuk pembiayaan (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Inklusi perbankan membuka peluang bagi UMKM untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak bank, memperoleh informasi yang lebih akurat tentang produk dan layanan perbankan, serta memanfaatkan teknologi perbankan untuk meningkatkan efisiensi operasional (Burgess & Pande, 2005). Dengan demikian, inklusi perbankan tidak hanya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan usaha secara berkelanjutan (Bruhn & Love, 2014).

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk memahami sinergi antara literasi keuangan dan inklusi perbankan dalam konteks akses pembiayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi keuangan dan inklusi perbankan dalam mendorong akses pembiayaan UMKM di Indonesia. Melalui kajian literatur ini, diharapkan dapat teridentifikasi solusi yang dapat mendukung keberlangsungan UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan suatu kemampuan yang esensial bagi individu dalam memahami dan mengelola informasi keuangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang bijak dalam manajemen keuangan pribadi. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), literasi

keuangan mencakup pengetahuan tentang konsep-konsep dasar seperti bunga, inflasi, dan risiko, yang semuanya berkontribusi pada pengambilan keputusan finansial yang lebih baik. Dalam konteks UMKM, literasi keuangan tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam merencanakan, mengelola utang, dan memilih produk keuangan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Literasi keuangan yang tinggi dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam menggunakan layanan keuangan formal, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini sejalan dengan temuan O'Neill et al. (2006) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan cenderung memiliki kontrol yang lebih baik atas pengeluaran dan lebih mampu menghindari utang.

Literasi keuangan dapat diukur melalui indikator berikut, yaitu: (1) Pengetahuan Keuangan Dasar. Indikator ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar keuangan, seperti bunga, inflasi, dan diversifikasi investasi. Menurut Lusardi (2008), kemampuan untuk memahami bagaimana bunga bekerja dan dampaknya terhadap tabungan dan utang merupakan aspek penting dari literasi keuangan; (2) Kemampuan Mengelola Anggaran. Kemampuan menyusun dan mengikuti anggaran adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa baik individu dapat mengelola pengeluaran mereka. O'Neill et al. (2006) menunjukkan bahwa individu yang dapat membuat anggaran cenderung lebih sukses dalam mengendalikan pengeluaran dan meminimalkan utang; (3) Pengambilan Keputusan Keuangan. Indikator ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas, termasuk dalam memilih produk keuangan yang tepat. Penelitian oleh Chen dan Volpe (1998) menunjukkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang lebih tinggi lebih mampu memilih investasi yang menguntungkan dan menghindari produk yang berisiko tinggi; (4) Pemahaman Risiko. Kemampuan untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan keputusan investasi juga merupakan indikator penting. Atkinson dan Messy (2012) menekankan bahwa individu yang sadar akan risiko lebih cenderung bertindak dengan hati-

hati dalam pengambilan keputusan investasi dan lebih mungkin untuk melakukan diversifikasi; dan (5) Keterampilan dalam Memanfaatkan Layanan Keuangan. Indikator ini mencakup kemampuan untuk menggunakan berbagai layanan keuangan, seperti rekening bank, pinjaman, dan asuransi. Literasi keuangan yang baik memungkinkan individu untuk memanfaatkan produk yang ditawarkan lembaga keuangan dengan lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM (Klapper et al., 2015).

Inklusi Perbankan

Inklusi perbankan merujuk pada akses yang luas dan penggunaan layanan keuangan formal oleh individu dan usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Demirgüç-Kunt et al. (2018), inklusi perbankan tidak hanya mencakup akses ke rekening bank, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti pinjaman, asuransi, dan investasi. Inklusi perbankan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberi kesempatan yang lebih baik bagi individu dan usaha untuk berkembang.

Inklusi perbankan sangat penting dalam konteks UMKM, karena akses yang baik terhadap layanan keuangan dapat membantu mereka dalam mengelola arus kas, mendapatkan modal, dan berinvestasi dalam pertumbuhan usaha. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan sering kali menjadi penghambat utama bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Klapper, 2013).

Indikator inklusi perbankan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana individu dan UMKM terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal. Berikut adalah beberapa indikator utama yang sering digunakan dalam pengukuran inklusi perbankan: (1) Akses terhadap Rekening Bank. Persentase populasi yang memiliki rekening bank adalah indikator dasar dari inklusi perbankan. Menurut Global Findex (2017), memiliki rekening bank adalah langkah pertama yang penting untuk mengakses layanan keuangan lainnya; (2) Penggunaan Layanan Keuangan. Indikator ini mencakup frekuensi penggunaan layanan keuangan,

seperti transaksi melalui rekening bank, penggunaan kartu kredit, dan pinjaman. Penggunaan layanan keuangan yang aktif menunjukkan bahwa individu tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memanfaatkan layanan tersebut secara efektif; (3) Akses terhadap Kredit. Persentase individu atau UMKM yang memiliki akses kepada produk kredit, baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank, menjadi indikator penting dalam menilai inklusi perbankan. Hal ini mencerminkan kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha; (4) Diversifikasi Produk Keuangan. Kemampuan untuk mengakses berbagai produk keuangan, seperti investasi, asuransi, dan produk pensiun, juga merupakan indikator inklusi perbankan yang signifikan. Diversifikasi produk menunjukkan seberapa baik individu dan UMKM dapat mengelola risiko dan merencanakan masa depan keuangan mereka; dan (5) Ketersediaan Layanan Keuangan Digital. Dengan perkembangan teknologi, akses terhadap layanan keuangan digital seperti mobile banking dan fintech menjadi indikator penting dari inklusi perbankan. Menurut Arner et al. (2017), layanan keuangan digital dapat meningkatkan inklusi perbankan dengan menawarkan akses lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional.

UMKM dan Tantangan Pembiayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meskipun kontribusi ini sangat signifikan, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu tantangan utama adalah persyaratan agunan yang ketat dari lembaga keuangan. Banyak UMKM tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan, sehingga mereka sulit memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini diperparah oleh prosedur pengajuan yang rumit, yang sering kali membutuhkan waktu dan dokumen yang sulit dipenuhi, sehingga menghalangi banyak pelaku usaha untuk

mendapatkan modal yang diperlukan (Mardiasmo et al., 2022).

Selain kendala akses, kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi penghambat signifikan. Banyak pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta tidak mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk meyakinkan lembaga keuangan dalam proses pengajuan pinjaman. Penelitian oleh BPS (2023) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan berkontribusi terhadap ketidakmampuan UMKM dalam mengelola keuangan secara efektif, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan menjadi suatu keharusan untuk membantu UMKM memanfaatkan peluang pembiayaan yang ada.

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membuka jalan baru bagi UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif. Platform *fintech*, seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*, menawarkan alternatif yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan bank tradisional, serta memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal tanpa harus memenuhi persyaratan agunan yang ketat. Menurut laporan dari OJK (2024), sektor *fintech* telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan berpotensi untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan penyedia layanan *fintech* sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

Akses Pembiayaan UMKM

Akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Meskipun UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, mereka sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang memadai. Menurut penelitian oleh Widyastuti et al. (2023), sekitar 70% pelaku UMKM di Indonesia mengaku

mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persyaratan agunan yang ketat, proses aplikasi yang rumit, serta kurangnya informasi mengenai produk keuangan yang tersedia.

Salah satu tantangan utama dalam akses pembiayaan adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pemilik UMKM. Banyak pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai manajemen keuangan dan pengelolaan risiko, yang membuat mereka kurang percaya diri dalam mengajukan pinjaman. Menurut Supriyanto dan Sari (2024), pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu mengelola keuangan dan memahami produk pinjaman, sehingga lebih mungkin untuk mendapatkan akses pembiayaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih baik bagi UMKM.

Di tengah tantangan ini, teknologi finansial (*fintech*) muncul sebagai solusi inovatif yang dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Platform *fintech*, seperti *peer-to-peer lending*, menawarkan alternatif yang lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan modal tanpa persyaratan agunan yang ketat. Laporan dari OJK (2024) menunjukkan bahwa penggunaan *fintech* di kalangan UMKM telah meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 40% pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional, pemerintah, dan penyedia layanan *fintech* sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan *literature review*. Materi berupa ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain) tentang topik yang sedang dibahas merupakan bagian dalam penulisan *Literature review*. Penulisan yang bersifat relevan, mutakhir, dan memadai

merupakan cerminan dari penulisan *Literature review* yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Literasi Keuangan dan Dampaknya terhadap Akses Pembiayaan UMKM

Literasi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan literasi keuangan memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami dan mengelola informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengajuan pinjaman. Menurut Lusardi dan Mitchell (2020), individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi lebih mampu mengevaluasi produk keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan utang dan investasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks UMKM, di mana keputusan finansial yang tepat dapat menentukan kelangsungan dan pertumbuhan usaha.

Penelitian oleh BPS (2023) menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Banyak UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai, sehingga sulit untuk meyakinkan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam proses pengajuan pinjaman. Ketidadaan pemahaman yang kuat tentang produk pinjaman, termasuk bunga dan syarat pembayaran, juga membuat pelaku UMKM cenderung ragu untuk mengakses pembiayaan formal. Dengan meningkatkan literasi keuangan, pelaku UMKM dapat lebih baik dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka, sehingga lebih percaya diri untuk mengajukan pinjaman.

Lebih lanjut, literasi keuangan juga berkontribusi pada pengelolaan risiko yang lebih baik. Pelaku UMKM yang memahami risiko finansial dan memiliki pengetahuan tentang cara mengelola risiko tersebut akan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian yang sering kali dihadapi dalam dunia usaha. Penelitian oleh Supriyanto dan Sari (2024) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan tentang diversifikasi investasi dan manajemen utang cenderung

lebih berhasil dalam mendapatkan akses pembiayaan, karena mereka dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengelola arus kas dan kewajiban finansial.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM sangat penting untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih baik. Program-program edukasi keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan finansial mereka. Laporan dari OJK (2024) menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan program literasi keuangan yang dapat memberikan dampak positif terhadap akses pembiayaan UMKM. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih siap dan mampu memanfaatkan peluang pembiayaan yang ada, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2 Peran Inklusi Perbankan dalam Memperluas Akses Modal UMKM

Inklusi perbankan memainkan peran penting dalam meningkatkan akses modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep inklusi perbankan merujuk pada kemampuan individu dan usaha untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal, termasuk rekening bank, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Menurut Demirgüç-Kunt et al. (2018), inklusi perbankan yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka. Dalam konteks UMKM, akses ke layanan keuangan sangat penting untuk mendukung inovasi, ekspansi, dan daya saing.

Salah satu aspek kunci dari inklusi perbankan adalah kemudahan dalam membuka rekening bank dan mendapatkan pinjaman. Penelitian oleh Widyastuti et al. (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki rekening bank cenderung lebih mudah dalam mengakses produk pembiayaan daripada mereka yang tidak memiliki. Memiliki rekening bank tidak hanya memberikan akses ke dana, tetapi juga menciptakan jejak keuangan yang dapat

digunakan untuk membangun kredibilitas di mata lembaga keuangan. Dengan demikian, inklusi perbankan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan UMKM dengan berbagai sumber pembiayaan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan besar dalam inklusi perbankan. Platform fintech memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan cepat bagi UMKM untuk mendapatkan akses modal, tanpa melalui prosedur yang panjang dan rumit. Menurut laporan OJK (2024), penggunaan layanan fintech di kalangan UMKM telah meningkat secara signifikan, dengan banyak pelaku usaha yang beralih ke pinjaman online dan layanan crowdfunding. Fintech tidak hanya mempercepat proses pengajuan pinjaman, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada agunan yang sering kali menjadi kendala bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal literasi keuangan. Meskipun inklusi perbankan dapat memperluas akses modal, tanpa pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan, pelaku UMKM mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi program-program edukasi keuangan untuk sejalan dengan upaya peningkatan inklusi perbankan. Dengan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang produk keuangan dan cara mengelola keuangan secara efektif, diharapkan akses modal dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan usaha dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

3.3 Hambatan Umum UMKM terkait Akses Pembiayaan Perbankan

Akses pembiayaan perbankan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah persyaratan agunan yang ketat yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan

pinjaman. Menurut penelitian oleh Widyastuti et al. (2023), sekitar 60% UMKM melaporkan bahwa ketidakmampuan untuk menyediakan agunan menjadi penghalang utama dalam mengakses pembiayaan. Persyaratan ini sering kali tidak sebanding dengan kapasitas finansial pelaku UMKM, yang pada umumnya masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi risiko yang tinggi.

Selain masalah agunan, proses pengajuan pinjaman yang rumit dan memakan waktu juga menjadi kendala signifikan bagi UMKM. Banyak pelaku usaha mengeluhkan prosedur yang panjang serta dokumen yang harus disiapkan, yang sering kali menyita waktu dan sumber daya mereka. Penelitian oleh Kemenkop UKM (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM merasa frustrasi dengan kompleksitas proses aplikasi, yang berpotensi mendorong mereka untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang mungkin lebih merugikan, seperti pinjaman dari rentenir. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan perlu melakukan inovasi dalam proses pengajuan pinjaman agar lebih sederhana dan ramah pengguna.

Kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga berkontribusi pada hambatan dalam mengakses pembiayaan. Banyak pemilik UMKM tidak memahami produk keuangan yang tersedia, serta tidak mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk meyakinkan lembaga keuangan. Penelitian oleh Supriyanto dan Sari (2024) mencatat bahwa pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung merasa kurang percaya diri untuk mengajukan pinjaman, yang memperburuk situasi mereka. Tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko dan manfaat dari pembiayaan, pelaku UMKM mungkin melewatkan peluang berharga untuk mendapatkan modal yang dapat membantu pertumbuhan usaha mereka.

Akhirnya, stigma sosial terkait penggunaan pinjaman juga dapat menjadi hambatan. Di beberapa komunitas, terdapat pandangan negatif terhadap utang, yang membuat pelaku UMKM enggan untuk mencari pembiayaan meskipun mereka membutuhkannya. Hal ini menciptakan siklus di mana UMKM tetap terjebak dalam keterbatasan modal, yang menghambat inovasi dan pertumbuhan.

Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat pembiayaan yang benar dan bagaimana mengelola utang secara efektif, agar pelaku UMKM dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk berkembang.

3.4 Sinergi Literasi dan Inklusi: Kunci Penguatan Akses Pembiayaan

Sinergi antara literasi keuangan dan inklusi perbankan merupakan faktor kunci dalam memperkuat akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Literasi keuangan yang tinggi memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan dan pengajuan pinjaman. Menurut Lusardi dan Mitchell (2020), individu dengan tingkat literasi keuangan yang baik lebih mampu mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang ada dalam dunia keuangan. Hal ini sangat relevan bagi UMKM yang sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses modal dan pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, inklusi perbankan memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka. Penelitian oleh Demirgüç-Kunt et al. (2018) menunjukkan bahwa peningkatan inklusi perbankan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM. Ketika pelaku UMKM memiliki akses ke rekening bank, pinjaman, dan produk keuangan lainnya, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk mengelola modal dan arus kas. Dalam konteks ini, literasi keuangan yang tinggi memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan yang tersedia.

Kombinasi antara literasi keuangan dan inklusi perbankan juga berpotensi menciptakan ekosistem yang lebih inklusif bagi UMKM. Penelitian oleh Supriyanto dan Sari (2024) menunjukkan bahwa program-program edukasi keuangan yang dirancang untuk UMKM dapat memperkuat literasi keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengakses layanan perbankan. Dengan meningkatnya pemahaman tentang produk keuangan, pelaku UMKM lebih cenderung untuk mengambil langkah proaktif

dalam mencari pembiayaan, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan usaha mereka.

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam mempromosikan literasi keuangan dan inklusi perbankan sangat diperlukan. Laporan OJK (2024) menekankan perlunya strategi terpadu yang mencakup pelatihan keuangan, penyediaan informasi yang tepat, dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dengan menciptakan sinergi yang kuat antara literasi dan inklusi, diharapkan UMKM dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

4. KESIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, literasi keuangan dan inklusi perbankan memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Literasi keuangan yang tinggi memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami dan mengelola informasi keuangan secara lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengajukan pinjaman. Inklusi perbankan, di sisi lain, memberikan akses yang lebih besar kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Sinergi antara keduanya menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, meskipun tantangan seperti persyaratan agunan yang ketat dan proses pengajuan pinjaman yang rumit masih perlu diatasi.

Kolaborasi yang efektif antara lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat literasi keuangan dan inklusi perbankan. Program-program edukasi keuangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan UMKM akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan finansial mereka. Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM lebih siap dalam memanfaatkan peluang pembiayaan yang ada, sehingga

berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

4.2 Saran

Lembaga keuangan perlu menginovasi produk dan layanannya dengan menyederhanakan proses pengajuan pinjaman dan mengurangi ketergantungan pada agunan. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai produk keuangan sangat penting agar pelaku UMKM dapat membuat keputusan yang lebih informatif. Lembaga keuangan harus responsif terhadap kebutuhan UMKM dalam pengembangan produk yang sesuai dan mudah diakses.

Pemerintah dan organisasi masyarakat harus berfokus pada peningkatan program-program edukasi keuangan untuk pelaku UMKM. Pelatihan mengenai manajemen keuangan, pengelolaan risiko, dan pemahaman tentang produk keuangan harus menjadi bagian integral dari strategi peningkatan akses pembiayaan. Dengan memperkuat literasi keuangan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mencari sumber pembiayaan dan memanfaatkan potensi usaha mereka secara maksimal. Upaya terkoordinasi dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Tabanan atas dukungan, arahan, serta fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pengelola Jurnal JIS Siwirabuda yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempublikasikan karya ilmiah ini serta bimbingan selama proses review dan penyuntingan artikel. Dukungan dan kontribusi tersebut sangat berarti dalam upaya meningkatkan kualitas dan diseminasi hasil penelitian di bidang ekonomi pembangunan, keuangan, dan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2011). Firm

innovation in emerging markets: The role of finance, governance, and competition. *Journal of Financial Economics*, 107(1), 154-169.

Atkinson, A., & Messy, F. A. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, No. 15. OECD Publishing.

Atkinson, A., & Messy, F. A. (2013). Promoting financial inclusion through financial literacy: OECD/INFE evidence, policies and practice. OECD.

Beck, T., & Cull, R. (2014). Small enterprise finance: Why is it so difficult? *World Development*, 41, 16-30.

Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931-2943.

Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945-2966.

Bruhn, M., & Love, I. (2014). The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico. *The Journal of Finance*, 69(3), 1347-1376.

Burgess, R., & Pande, R. (2005). Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment. *The American Economic Review*, 95(3), 780-795.

Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107-128.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, D. (2018). The global Findex database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution. World Bank Group.

- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. F., & Singer, D. (2018). The global Findex database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. The World Bank.
- Kemendagri. (2023). Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kemendagri. (2024). Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM: Akses pembiayaan untuk UMKM.
- Klapper, L. (2013). Financial inclusion in Africa: A major challenge for the financial sector. World Bank Policy Research Working Paper.
- Klapper, L., Lusardi, A., & Panos, G. A. (2015). Financial literacy and the financial crisis. *Journal of Banking & Finance*, 62, 1-16.
- Lusardi, A. (2008). Financial literacy: An essential tool for informed consumer choice? *The Journal of Consumer Affairs*, 42(2), 240-258.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2020). Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing. *Journal of Economic Literature*, 58(1), 55-112.
- Mardiasmo, D., Purnomo, E., & Salim, M. (2022). Tantangan dan peluang pembiayaan UMKM: Perspektif ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 45-59.
- O'Neill, B., et al. (2006). Financial literacy: What adults need to know and how they learn it. National Endowment for Financial Education.
- OJK. (2024). Laporan perkembangan fintech di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.
- Supriyanto, A., & Sari, R. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1), 25-35.
- Tambunan, T. (2019). SMEs in Asian developing countries. Springer.
- UNCTAD. (2021). Creative economy outlook: Trends and policy challenges. United Nations Conference on Trade and Development.
- Widyastuti, A., Rahman, A., & Harjanto, D. (2023). Tantangan pembiayaan UMKM di Indonesia: Analisis dan solusi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(2), 150-165.
- World Bank. (2022). Indonesia economic prospects.